



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

LAPORAN

**MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK
DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunianya kami telah menyelesaikan proses–proses Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2021 hingga akhirnya pada tahap penyusunan laporan ini. Tahapan penyusunan laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan monev keterbukaan informasi badan publik Tahun 2021 yang dimulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi.

Monev Keterbukaan Informasi Publik diselenggarakan oleh KID DIY merupakan amanah yang ada UU KIP pada Pasal 7 dan Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 37, dan 38, serta Pergub DIY Nomor 29 Tahun 2016 tentang KID DIY pada Pasal 4 Huruf d.

Monev Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik, tidak hanya berorientasi pada pencarian juara, namun juga berorientasi pada pemberian klasifikasi tiap Badan Publik. Pengembangan inovasi juga dilakukan khususnya terkait dengan penggunaan aplikasi portal *E-Monev* khususnya untuk pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ) sebagai pengganti Self Assesment Questionnaire (SAQ) sistem konvensional terdahulu.

Hasil dari Monev Keterbukaan Informasi Publik pada tahun ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari badan publik terhadap pelaksanaan UU 14 tahun 2008 tentang KIP. Akhirnya, dengan melihat capaian yang ada, maka masih diperlu peningkatan komitmen dalam implementasi UU KIP ke semua stakeholder. Masukan, kritik, saran, dan hasil evaluasi menjadi penting guna melihat kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan monev yang dilakukan dan di jadikan masukan perbaikan ke depan.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Latar Belakang.....	3
2. Dasar Kegiatan, Maksud, dan Tujuan.....	4
3. Proses dan Mekanisme.....	5
a.pemeringkatan.....	6
b.kejuaraan.....	8
4. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021.....	8
a.data Badan Publik Yang Mengikuti Monitoring dan Evaluasi.....	8
b.pemeringkatan.....	10
c.kejuaraan.....	44
d.Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik.....	47
5. Kondisi Umum dan Pembelajaran.....	49
a. Kondisi Umum.....	49
b. Catatan Khusus.....	50
c. Nilai Pembelajaran.....	52
6. Penutup.....	53

1. Latar Belakang

Lahirnya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan akan hak atas Informasi Publik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah adanya jaminan hak publik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam kehidupannya yang sesuai dengan peraturan yang ada dan Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Jaminan akan hak informasi publik bagi warga negara sangat penting untuk memastikan adanya peran serta masyarakat dalam pengawasan kerja-kerja pemerintahan sehingga mampu dipertanggungjawabkan secara publik. Partisipasi masyarakat tersebut tidak akan ada kalau tidak ada jaminan keterbukaan informasi publik.

Untuk mengukur sejauhmana kepatuhan Badan Publik dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada badan Publik dilakukan Monitoring dan evaluasi pada Badan Publik. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) yang salah satu Ketugasannya adalah mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan melaporkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.

Dengan dasar hukum Pasal 7 UU KIP, Pasal 37, dan 38 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Pasal 4 Huruf d Pergub DIY Nomor 29 Tahun 2016, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan *“Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021”*

1. Dasar Kegiatan, Maksud, dan Tujuan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. didasarkan pada Pasal 23 UU KIP dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk melaksanakan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik dan mengumumkannya ke publik. Adapun maksud dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2021 adalah mendorong percepatan dan peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik di badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara tujuan Monitoring dan evaluasi Keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2021 adalah:

1. melakukan pemetaan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. melakukan pemeringkatan terhadap kelengkapan, responsibilitas badan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
3. mendapatkan data terkait program peningkatan percepatan penerapan keterbukaan informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. sebagai upaya masukan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota/Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pembinaan dan penataan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi; dan
5. pemberian penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Proses dan Mekanisme

Tahun ini adalah Tahun ketujuh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk mengevaluasi implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dengan metode yang telah dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih terukur dalam konteks wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Monitoring dan Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY tahun 2021 ini sudah dimulai sejak bulan Maret sampai bulan Oktober tahun 2021, dari Tahapan Pembentukan Tim dan Sosialisasi kepada Badan Publik, pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ), Uji Website, Uji Akses dan Visitasi kepada Badan Publik untuk menentukan Pemingkatan dan Kejuaraan. Dengan demikian dari hasil pemeringkatan seluruh badan publik akan mengetahui hasil monitoring dan evaluasi terhadap badan publik tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerjanya pada masa-masa mendatang

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY tahun 2021 ini, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan beberapa tokoh pegiat keterbukaan informasi publik yang berasal dari instansi di luar KID DIY baik dari lembaga perguruan tinggi Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (Badan PublikSDMP), dan juga dari *Civil Society Organization (CSO)* yaitu IDEA Yogyakarta, dan *Combine Resource Institution (CRI)*.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik semua anggota tim berperan aktif sejak merumuskan instrumen

penilaian sampai melakukan penilaian. Pelibatan tersebut dimaksudkan selain untuk menjaga objektivitas juga secara umum untuk meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi.

Tim monitoring dan evaluasi Badan Publik Tahun 2021 juga menyepakati beberapa ketentuan pokok antara lain bahwa kategori yang dimonev dikelompokkan dalam 10 klaster yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
2. OPD Pemerintah Daerah DIY;
3. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
4. OPD Kapanewon/Kemantren se-DIY;
5. Lembaga Legislatif se-DIY;
6. Partai Politik di DIY;
7. Lembaga Non Struktural di DIY;
8. Lembaga Yudikatif di DIY;
9. Instansi Vertikal di DIY; dan
10. Badan Usaha Milik Daerah se-DIY.

a. Pemeringkatan (Kualifikasi)

Seperti tahun sebelumnya, Monev tahun 2021 untuk melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi pada Badan Publik, dimana badan publik bisa melihat posisi kualifikasi badan publik tersebut, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya pada masa-masa mendatang.

Tahun ini Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan terobosan baru dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan Portal E-Monev dengan alamat <https://www.monev-kid.jogjaprov.go.id>, yang harapannya badan publik akan dimudahkan dalam mengisi Self Assesment Questionnaire (SAQ) pada saat tahapan pemeringkatan, dimana di Portal E-Monev tersebut badan publik cukup mencentang pertanyaan yang disertai data pendukung langsung pada portal e-monev tersebut.

bobot untuk tahapan pemeringkatan meliputi:

No.	Tahapan	Bobot
1.	Self Assesment Questionnaire (SAQ)	30%
2.	Uji Website	35%
3.	Uji Akses	35%

Untuk mendapatkan hasil yang presisif sesuai dengan realitas implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik, Komisi Informasi Daerah DIY melakukan 3 (tiga) proses penilaian dalam Tahapan pertama yaitu tahapan Pemeringkatan, yaitu:

1. **Self Assesment Questionnaire (SAQ)** memiliki bobot 30%, Penilaian yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Publik dengan cara registrasi dan menjawab kuesioner yang disertai data pendukung pada tiap pertanyaan pada Portal E-Monev. Selanjutnya seluruh badan publik yang sudah registrasi dan mengisi Self Assesment Questionnaire (SAQ) tersebut kemudian dinilai oleh Tim Monev. Tahapan dilakukan pada tanggal 02 Juni – 06 Juli 2021.
2. **Uji Website** memiliki bobot 35%, Uji Website atau pemerhatian *Website* oleh Tim Monev berdasarkan badan publik yang Registrasi pada Portal E-Monev. Tahapan dilakukan pada tanggal 21 Juni – 31 Juli 2021.
3. **Uji Akses** memiliki bobot 35%, Uji Akses yang dilakukan melalui surat elektronik *e-mail* Badan Publik yang tercantum pada data Badan Publik yang sudah registrasi di Portal E-Monev. Penilaian di tentukan berdasarkan respon Badan Publik dan bobot jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Tim mempergunakan *e-mail* pribadi masing masing anggota tim. Tahapan dilakukan pada tanggal 11 Juni – 30 Juli 2021.

Dari tiga proses tersebut maka dapat diketahui jumlah hasil akhir nilai berupa Kualifikasi :

1. Informatif : Nilai 90 - 100
2. Menuju Informatif : Nilai 80 - 89
3. Cukup Informatif : Nilai 60 - 79
4. Kurang Informatif : Nilai 40 - 59
5. Tidak Informatif : Nilai < 40

b. **Kejuaraan**

Penentuan juara 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap kategori/*cluster* dilakukan dengan visitasi terhadap 3 Badan Publik yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap *cluster* dengan syarat apabila nilainya minimal 90 (memenuhi kualifikasi “Informatif”). Penentuan juara dalam tiap kategori dilakukan dengan cara visitasi secara offline dengan melihat secara langsung kondisi lapangan badan publik yang masuk tahapan kejuaraan yang dilaksanakan pada tanggal 13 - 15 Oktober 2021.

4. **Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021**

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 terdiri dari tiga penghargaan yang diberikan kepada badan publik terdiri dari Pemingkatan, Kejuaraan dan pemberian apresiasi kepada Lembaga atau perseorangan yang berkomitmen kepada Keterbukaan Informasi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. **Data Badan Publik yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi.**

Dari 383 Badan Publik yang di kirim surat oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021, Terdapat 355 Badan Publik (92,69%) yang melakukan

registrasi pada Portal E-Monev dan yang tidak registrasi sejumlah 28 Badan Publik (7,31%).

Sedangkan dari 355 Badan Publik yang sudah registrasi pada Portal E-Monev, 310 (87,32%) Badan Publik mengisi Self Assesment Questionnaire (SAQ) pada Portal E-Monev dan 45 (12,68%) Badan Publik tidak mengisi Self Assesment Questionnaire (SAQ).

Prosentase jumlah Badan Publik yang Registrasi atau mengembalikan Self Assesment Questionnaire (SAQ) (istilah tahun 2020) tersebut meningkat 3,13 % apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yakni dari 383 Badan Publik yang dikirim Self Assesment Questionnaire (SAQ) yang mengembalikan sejumlah 343 badan publik (89,56%). Badan Publik yang sudah dikirim surat untuk mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi tahun 2021 tetapi tidak registrasi pada Portal E-Monev diberi predikat pada tahapan pemeringkatan dengan kualifikasi “tidak dinilai”.

DATA BADAN PUBLIK YANG MENGIKUTI MONEV KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2021

NO	KATEGORI	JUM LAH Badan Publik	REGIST RASI	TIDAK REGIST RASI	PERSENT ASE REGISTRASI	PERSENT ASE TIDAK REGISTRASI
1	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY	5	5	0	100%	0%
2	OPD PEMERINTAH DAERAH DIY	37	37	0	100%	0%
3	OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY	158	158	0	100%	0%

4	OPD KAPANEWON/KEMANTREN SE-DIY	78	78	0	100%	0%
5	LEMBAGA LEGISLATIF SE-DIY	6	5	1	83%	17%
6	PARTAI POLITIK SE-DIY	10	3	7	30%	70%
7	LEMBAGA YUDIKATIF SE-DIY	14	11	3	79%	21%
8	INSTANSI VERTIKAL SE-DIY	43	31	12	72%	28%
9	BADAN NON STRUKTURAL SE-DIY	15	13	2	87%	13%
10	BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY	17	14	3	82%	18%
JUMLAH		383	355	28	92,69%	7,31%

b. Pemeringkatan

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian dalam pemeringkatan, Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di wilayah DIY tahun 2021, kemudian menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi ke dalam Surat Keputusan nomor 02/KEP/KIDDIY/X/2021 tentang “Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021”.

Berdasarkan penilaian terhadap SAQ, verifikasi website, dan uji akses, yang tertuang pada Surat Keputusan sehingga ditetapkan hasil pemeringkatan badan publik tahun 2021 yaitu:

1. Informatif : 89 Badan Publik (23,24%);
2. Menuju Informatif : 67 Badan Publik (17,49%);

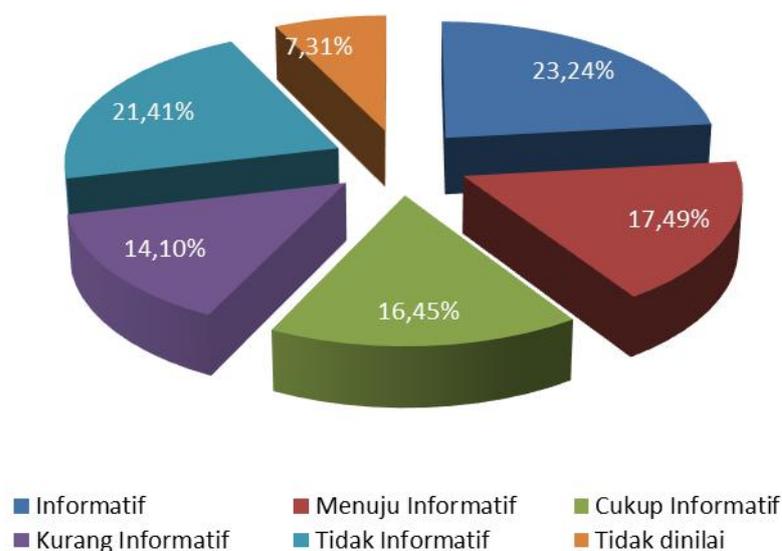
- 3. Cukup Informatif : 63 Badan Publik (16,45%);
- 4. Kurang Informatif : 55 Badan Publik (14,10%);
- 5. Tidak Informatif : 82 Badan Publik (21,41%); dan
- 6. Tidak dinilai : 28 Badan Publik (7,31%)

89 Badan publik yang memperoleh kualifikasi informatif tersebut tersebar pada 9 kategori, yaitu :

- 1. Pemerintah kabupaten/kota: 5 badan publik;
- 2. OPD Pemda DIY: 4 OPD;
- 3. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY: 42 OPD;
- 4. OPD Kapanewon/Kemantren se DIY: 24 OPD ;
- 5. lembaga Legislatif: 1 badan publik;
- 6. lembaga yudikatif: 2 badan publik;
- 7. instansi vertikal di DIY: 4 instansi;
- 8. Lembaga Non Struktural se DIY: 6 badan publik; dan
- 9. BUMD se DIY: 1 badan publik.

Dengan demikian, terdapat 1 kategori yang tidak satupun badan publik di dalamnya yang mencapai kualifikasi informatif, yaitu partai politik.

Gambaran Klasifikasi berdasarkan Pemingkatan

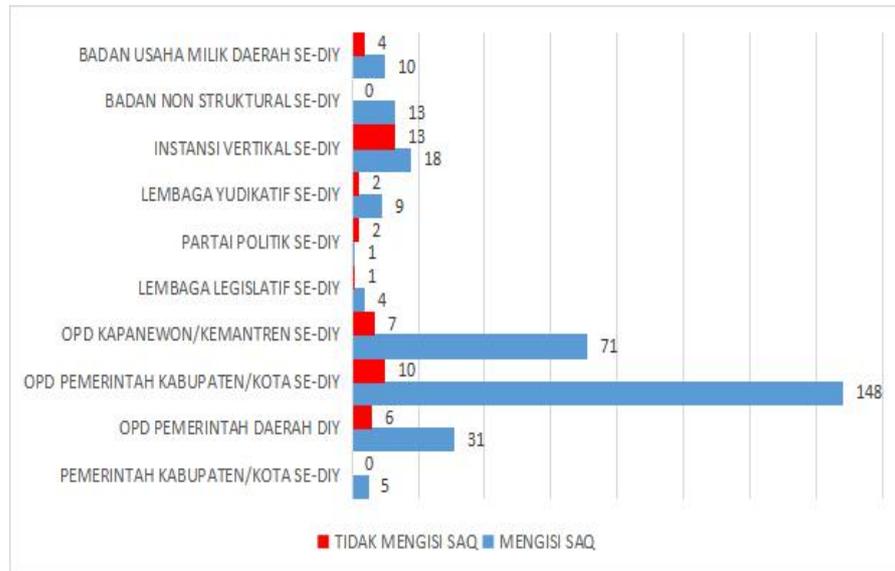


Tabel Data Klasifikasi

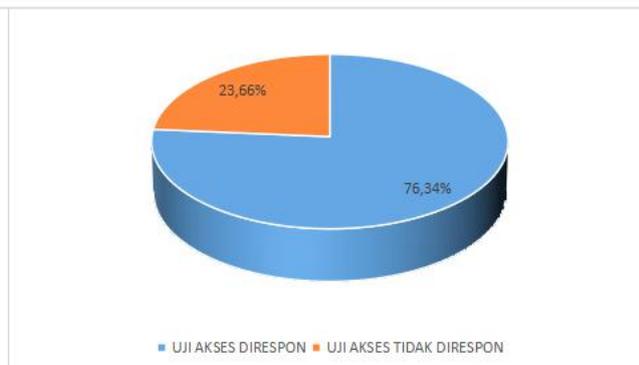
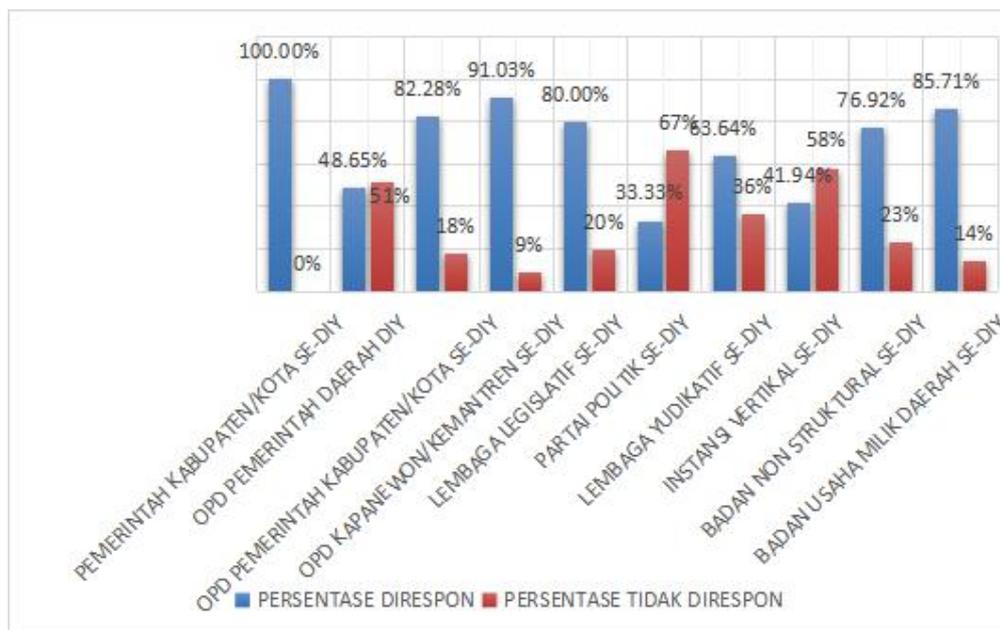
NO	KATEGORI	KUALIFIKASI					
		INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	TIDAK INFORMATIF	TIDAK DINILAI
1	Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	5	0	0	0	0	0
2	OPD Pemerintah Daerah DIY	4	4	3	12	14	0
3	OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY	42	41	30	12	33	0
4	OPD Kemantren/Kapanewon se-DIY	24	14	15	16	9	0
5	Lembaga Legislatif se-DIY	1	0	1	2	1	1
6	Partai Politik di DIY	0	0	1	0	2	7
7	Lembaga Yudikatif se-DIY	2	3	4	1	1	3
8	Instansi Vertikal se-DIY	4	3	3	6	15	12
9	Badan Non.Struktural se-DIY	6	1	3	2	1	2
10	BUMD se-DIY	1	1	3	3	6	3
	JUMLAH	89	67	63	54	82	28

Beberapa faktor penyebab Badan Publik yang masuk dalam peringkat tidak informatif (21,41%) dan kurang informatif (14,10%) adalah masih rendahnya respons Badan Publik saat dimintai informasi melalui *email* sebagai metode uji akses yang merupakan salah satu komponen penilaian. Dari 355 Badan Publik yang dilakukan uji akses, 271 Badan Publik (76,34%) memberikan respons, sedangkan yang tidak merespons sejumlah 84 Badan Publik (23,66%). Sedangkan faktor penyebab lainnya yaitu dari 355 Badan Publik yang registrasi pada Portal E-Monev, 310 Badan Publik (87,32%) mengisi SAQ dan 45 Badan Publik (12,68%) tidak mengisi SAQ meskipun sudah registrasi pada Portal E-Monev.

Grafik Pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ)

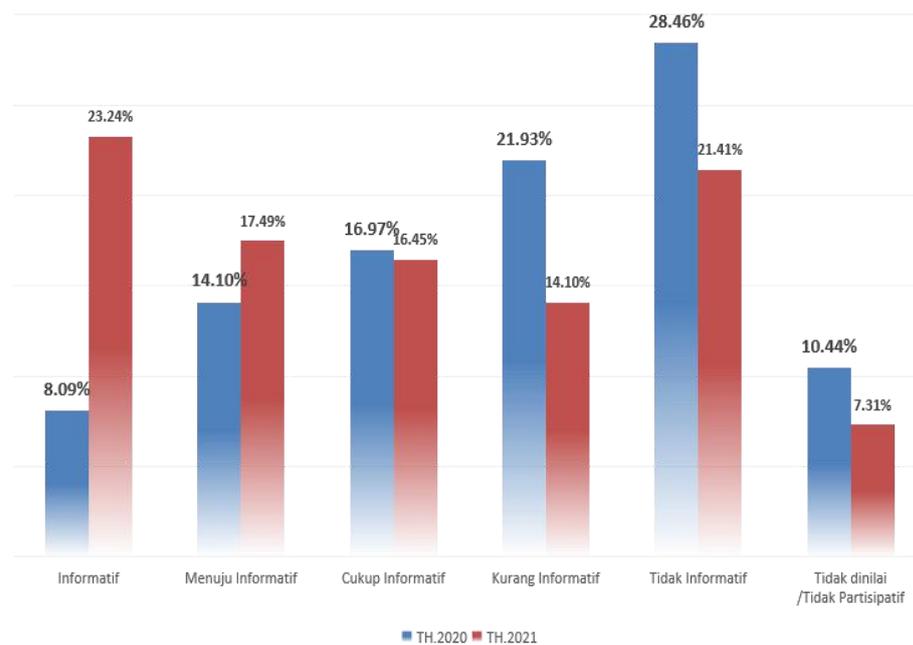


Grafik Respon Uji Akses



Terdapat kenaikan signifikan dibandingkan dengan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2020 lalu, dimana naiknya kualifikasi Informatif dan berkurangnya kualifikasi tidak informatif di beberapa kategori monitoring dan evaluasi. Tahun 2020 Badan Publik yang mendapat kualifikasi Informatif 31 Badan Publik (8,09%), Tahun 2021 kualifikasi Informatif sebanyak 89 Badan Publik (23,24%) bertambah 58 Badan Publik atau naik 15,15%. Sedangkan di tahun 2020 sebanyak 150 Badan Publik (39,16%) tidak informatif, di tahun 2021 yang tidak informatif sebanyak 82 Badan Publik (21,41%) berkurang 68 Badan Publik atau 17,75%.

Perbandingan Hasil Pemingkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 dan Tahun 2021



**HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK
TAHUN 2021
BERDASARKAN PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK**

1. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “INFORMATIF”

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Pemerintah Kabupaten Sleman	30,00	34,13	35,00	99,13
2.	Pemerintah Kabupaten Bantul	28,80	34,34	35,00	98,14
3.	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	28,30	34,34	35,00	97,64
4.	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	29,60	32,90	35,00	97,50
5.	Pemerintah Kota Yogyakarta	29,20	27,78	35,00	91,98
OPD PEMERINTAH DAERAH DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Badan Kepegawaian Daerah DIY	29,20	31,06	35,00	95,26
2.	Dinas Sosial DIY	27,80	31,94	35,00	94,74
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	27,50	29,75	35,00	92,25
4.	Dinas Koperasi dan UKM DIY	24,10	32,90	35,00	92,00

OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ	UJI WEBSITE	UJI AKSES	TOTAL NILAI
		30%	35%	35%	
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo	30,00	35,00	35,00	100,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo	30,00	35,00	35,00	100,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo	29,60	35,00	35,00	99,60
4.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo	29,60	35,00	35,00	99,60
5.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo	28,90	35,00	35,00	98,90
6.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	29,60	33,91	35,00	98,51
7.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kulon Progo	28,40	35,00	35,00	98,40
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo	28,40	35,00	35,00	98,40
9.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	30,00	33,25	35,00	98,25
10.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	28,60	34,56	35,00	98,16
11.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman	27,80	35,00	35,00	97,80

12.	Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo	29,60	32,90	35,00	97,50
13.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	28,90	33,25	35,00	97,15
14.	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	28,90	33,25	35,00	97,15
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	29,10	32,81	35,00	96,91
16.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman	28,60	33,25	35,00	96,85
17.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo	26,80	35,00	35,00	96,80
18.	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	30,00	31,50	35,00	96,50
19.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo	26,20	35,00	35,00	96,20
20.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gunungkidul	29,60	31,50	35,00	96,10
21.	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo	26,50	34,56	35,00	96,06
22.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo	29,40	35,00	31,50	95,90
23.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul	30,00	30,85	35,00	95,85
24.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo	28,90	35,00	31,50	95,40
25.	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo	26,00	34,35	35,00	95,35

26.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	29,50	34,35	31,50	95,34
27.	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	27,70	32,60	35,00	95,29
28.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul	25,30	34,56	35,00	94,86
29.	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	27,40	31,94	35,00	94,34
30.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman	25,10	33,69	35,00	93,79
31.	Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	25,10	33,47	35,00	93,57
32.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	27,60	34,35	31,50	93,45
33.	Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sleman	25,60	32,81	35,00	93,41
34.	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	28,90	29,09	35,00	92,99
35.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul	28,80	28,66	35,00	92,46
36.	Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo	30,00	27,35	35,00	92,35
37.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	24,30	32,29	35,00	91,59
38.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul	27,90	28,66	35,00	91,56
39.	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul	29,00	26,91	35,00	90,91
40.	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul	28,10	27,56	35,00	90,66

41.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Sleman	24,40	31,06	35,00	90,46
42.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul	26,70	28,35	35,00	90,05
OPD KAPANEWON/KEMANTREN SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Kemantren Mantrijeron	30,00	35,00	35,00	100,00
2.	Kapanewon Ngaglik	30,00	34,35	35,00	99,35
3.	Kapanewon Depok	28,70	35,00	35,00	98,70
4.	Kapanewon Ngemplak	28,40	35,00	35,00	98,40
5.	Kapanewon Moyudan	27,70	34,13	35,00	96,82
6.	Kapanewon Cangkringan	26,20	34,56	35,00	95,76
7.	Kapanewon Nanggulan	26,90	33,25	35,00	95,15
8.	Kapanewon Kalibawang	29,00	30,93	35,00	94,93
9.	Kapanewon Semin	27,90	30,85	35,00	93,75
10.	Kapanewon Girisubo	27,00	31,28	35,00	93,28
11.	Kemantren Kotagede	26,10	31,94	35,00	93,04
12.	Kapanewon Tanjungsari	27,40	34,13	31,50	93,02

13.	Kapanewon Galur	25,50	32,38	35,00	92,88
14.	Kapanewon Nglipar	27,10	30,71	35,00	92,81
15.	Kapanewon Semanu	25,00	32,38	35,00	92,37
16.	Kapanewon Ngawen	25,60	31,72	35,00	92,32
17.	Kapanewon Mlati	23,10	33,91	35,00	92,01
18.	Kapanewon Tempel	23,70	33,25	35,00	91,95
19.	Kapanewon Sentolo	22,30	34,56	35,00	91,86
20.	Kapanewon Pajangan	22,50	34,35	35,00	91,85
21.	Kapanewon Lendah	25,40	30,93	35,00	91,33
22.	Kapanewon Godean	22,10	34,13	35,00	91,23
23.	Kapanewon Rongkop	26,40	32,81	31,50	90,71
24.	Kapanewon Patuk	25,30	30,19	35,00	90,49
LEMBAGA LEGISLATIF SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	DPRD Kabupaten Kulon Progo	29,40	32,46	29,75	91,61

LLEMBAGA YUDIKATIF SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Pengadilan Agama Yogyakarta	28,80	34,35	35,00	98,15
2.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	27,30	34,35	35,00	96,65
LEMBAGA NON STRUKTURAL SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	27,50	34,13	35,00	96,63
2.	Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	29,50	31,50	35,00	96,00
3.	Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta	28,90	30,84	35,00	94,74
4.	Bawaslu Kota Yogyakarta	27,70	31,50	35,00	94,20
5.	Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul	26,60	31,50	35,00	93,10
6.	Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	28,20	32,38	31,50	92,08
INSTANSI VERTIKAL SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik	30,00	35,00	35,00	100,00
2.	Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan D.I. Yogyakarta	29,60	34,56	35,00	99,16

3.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	28,90	33,25	31,50	93,65
4.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta	23,90	33,03	35,00	91,93
BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	PT Badan PublikR Bank Sleman (PERSERODA)	29,00	30,80	35,00	94,80

2. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “MENUJU INFORMATIF”

OPD PEMERINTAH DAERAH DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan ESDM DIY	22,80	27,78	35,00	85,58
2.	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	24,20	24,37	35,00	83,57
3.	Dinas Kesehatan DIY	26,60	19,78	35,00	81,38
4.	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY	20,40	25,90	35,00	81,30
OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Gunungkidul	28,40	26,25	35,00	89,65

2.	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	21,10	33,47	35,00	89,57
3.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gunungkidul	25,90	28,66	35,00	89,56
4.	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	24,80	29,75	35,00	89,55
5.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman	25,10	29,31	35,00	89,41
6.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	27,70	26,69	35,00	89,39
7.	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	25,90	28,44	35,00	89,34
8.	Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul	24,20	29,75	35,00	88,95
9.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul	26,90	26,91	35,00	88,81
10.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul	26,50	27,13	35,00	88,62
11.	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	28,90	35,00	24,50	88,40
12.	Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul	25,80	27,48	35,00	88,28
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunungkidul	27,40	25,86	35,00	88,26
14.	RSUD Prambanan	23,90	29,31	35,00	88,21
15.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul	26,80	26,25	35,00	88,05
16.	Inspektorat Kabupaten Sleman	19,00	33,91	35,00	87,91

17.	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	28,00	24,90	35,00	87,89
18.	Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul	25,50	27,34	35,00	87,84
19.	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	26,10	26,69	35,00	87,79
20.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Gunungkidul	26,50	26,25	35,00	87,75
21.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman	22,60	29,97	35,00	87,57
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul	22,70	29,75	35,00	87,45
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Bantul	24,20	28,00	35,00	87,20
24.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sleman	21,90	29,53	35,00	86,43
25.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul	27,00	23,84	35,00	85,84
26.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo	17,10	33,69	35,00	85,79
27.	Badan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sleman	20,80	29,97	35,00	85,77
28.	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	25,60	25,16	35,00	85,76
29.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	24,20	29,75	31,50	85,45
30.	Dinas Sosial Kabupaten Sleman	22,90	27,35	35,00	85,24
31.	Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	21,10	29,09	35,00	85,19

32.	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	27,50	22,31	35,00	84,81
33.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul	23,10	26,25	35,00	84,35
34.	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	26,80	25,73	31,50	84,02
35.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul	19,20	27,91	35,00	82,11
36.	RSUD Wonosari	27,80	19,29	35,00	82,09
37.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul	19,70	27,34	35,00	82,04
38.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	17,80	29,10	35,00	81,89
39.	Inspektorat Kota Yogyakarta	28,20	18,68	35,00	81,88
40.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bantul	21,10	25,46	35,00	81,56
41.	RSUD Nyi Ageng Serang	21,60	28,66	29,75	80,01
OPD KAPANEWON/KEMANTREN SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Kapanewon Ponjong	28,40	26,12	35,00	89,52
2.	Kapanewon Gedangsari	27,10	26,78	35,00	88,87
3.	Kapanewon Prambanan	19,20	33,69	35,00	87,89
4.	Kapanewon Tepus	25,50	30,63	31,50	87,63
5.	Kapanewon Karangmojo	23,80	28,44	35,00	87,24
6.	Kapanewon Playen	23,60	28,44	35,00	87,04

7.	Kapanewon Wonosari	23,00	28,96	35,00	86,96
8.	Kapanewon Turi	22,90	28,79	35,00	86,69
9.	Kemantren Gondomanan	21,70	29,62	35,00	86,32
10.	Kapanewon Gamping	20,90	28,88	35,00	84,78
11.	Kapanewon Seyegan	19,20	29,10	35,00	83,30
12.	Kapanewon Purwosari	24,80	26,47	31,50	82,77
13.	Kapanewon Pengasih	24,80	26,12	31,50	82,42
14.	Kapanewon Sedayu	15,80	33,69	31,50	80,99
LEMBAGA YUDIKATIF SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Pengadilan Agama Wonosari	22,70	31,81	35,00	89,51
2.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	27,00	27,43	35,00	89,43
3.	Pengadilan Negeri Wonosari	22,10	30,85	35,00	87,95
LEMBAGA NON STRUKTURAL SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	KPU Kota Yogyakarta	22,30	24,37	35,00	81,67
INSTANSI VERTIKAL SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Perwakilan BKKBN DIY	26,30	31,76	29,75	87,81

2.	Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta	16,30	34,35	35,00	85,64
3.	Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta	23,50	27,13	35,00	85,62
BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Perumda Badan Publik R Bank Jogja	23,90	29,05	35,00	87,95

3. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “CUKUP INFORMATIF”

OPD PEMERINTAH DAERAH DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	9,10	31,15	29,75	70,00
2.	Rumah Sakit Paru Respirasi DIY	19,60	10,06	35,00	64,66
3.	Biro Umum, Humas dan Protokol DIY	28,70	33,91	0,00	62,61
OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	15,50	29,31	35,00	79,81
2.	Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman	20,80	23,93	35,00	79,73
3.	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	15,10	29,31	35,00	79,41
4.	Dinas Lingkungan Hidup	19,40	24,59	35,00	78,99

	Kabupaten Bantul				
5.	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul	27,90	14,57	35,00	77,47
6.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Bantul	16,80	28,88	31,50	77,18
7.	Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman	9,20	32,81	35,00	77,01
8.	Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	13,40	28,44	35,00	76,84
9.	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olaharga Kabupaten Bantul	16,70	24,50	35,00	76,20
10.	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	19,30	21,88	35,00	76,17
11.	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bantul	18,60	27,65	29,75	76,00
12.	Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta	17,40	23,28	35,00	75,68
13.	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	22,70	17,90	35,00	75,60
14.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo	21,80	28,44	24,50	74,74
15.	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	17,80	21,53	35,00	74,32
16.	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	26,20	28,44	17,50	72,14
17.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman	7,20	29,31	35,00	71,51
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	17,10	17,37	35,00	69,47
19.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta	16,50	17,90	35,00	69,40

20.	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	14,30	21,44	31,50	67,24
21.	Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	15,80	16,36	35,00	67,16
22.	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta	22,20	8,49	35,00	65,69
23.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bantul	11,30	21,22	31,50	64,02
24.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Yogyakarta	6,50	21,83	35,00	63,33
25.	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul	25,50	2,63	35,00	63,13
26.	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo	14,30	23,19	24,50	61,99
27.	Dinas Perhubungan Kulon Progo	11,60	15,36	35,00	61,96
28.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo	25,00	12,08	24,50	61,57
29.	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sleman	8,30	17,85	35,00	61,15
30.	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	7,30	18,16	35,00	60,46
OPD KAPANEWON/KEMANTREN SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Kapanewon Bambanglipuro	16,10	28,88	35,00	79,98
2.	Kemantren Wirobrajan	16,00	26,25	35,00	77,25
3.	Kemantren Gondokusuman	15,70	24,37	35,00	75,07
4.	Kapanewon Wates	11,50	27,87	35,00	74,37

5.	Kapanewon Minggir	8,80	27,35	35,00	71,14
6.	Kemantren Danurejan	17,90	21,57	31,50	70,97
7.	Kapanewon Saptosari	21,30	22,75	26,60	70,65
8.	Kapanewon Panggang	16,20	22,75	31,50	70,45
9.	Kemantren Kraton	14,60	20,30	35,00	69,90
10.	Kapanewon Sleman	10,50	33,69	24,50	68,69
11.	Kemantren Jetis	19,40	14,00	35,00	68,40
12.	Kapanewon Kretek	10,30	24,50	31,50	66,30
13.	Kapanewon Samigaluh	20,00	11,29	35,00	66,29
14.	Kapanewon Imogiri	17,50	30,41	17,50	65,41
15.	Kapanewon Piyungan	24,80	9,01	31,50	65,31

LEMBAGA LEGISLATIF SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ	UJI WEBSITE	UJI AKSES	TOTAL NILAI
		30%	35%	35%	
1.	DPRD Kabupaten Sleman	21,90	19,25	35,00	76,15

LEMBAGA YUDIKATIF SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ	UJI WEBSITE	UJI AKSES	TOTAL NILAI
		30%	35%	35%	
1.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	19,30	22,93	35,00	77,22
2.	Pengadilan Negeri Wates	0,00	30,93	35,00	65,93
3.	Pengadilan Agama Wates	28,90	33,69	0,00	62,59
4.	Pengadilan Agama Sleman	29,30	32,90	0,00	62,20

LEMBAGA NON STRUKTURAL SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	KPU Kabupaten Gunungkidul	18,50	22,84	29,75	71,09
2.	KPU Kabupaten Kulon Progo	13,30	23,49	31,50	68,29
3.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY	22,80	9,98	35,00	67,78
INSTANSI VERTIKAL SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	12,80	26,03	31,50	70,33
2.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman	14,70	21,70	31,50	67,90
3.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul	13,00	21,09	26,60	60,69
PARTAI POLITIK SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	DPD Partai Gerindra DIY	17,70	26,91	35,00	79,61
BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	PT. Badan PublikR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda)	12,80	23,80	35,00	71,60
2.	PD Jogjatama Vishesha	15,20	19,25	35,00	69,45

3.	Perumda Badan Publik R Bank Kulon Progo	9,70	16,80	35,00	61,50
----	---	------	-------	-------	--------------

4. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “KURANG INFORMATIF”

OPD PEMERINTAH DAERAH DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ	UJI WEBSITE	UJI AKSES	TOTAL NILAI
		30%	35%	35%	
1.	Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY	7,30	17,24	35,00	59,54
2.	Dinas Perhubungan DIY	7,80	14,40	35,00	57,20
3.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY	26,10	26,47	0,00	52,57
4.	BAPPEDA DIY	22,30	29,84	0,00	52,14
5.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY	20,60	27,21	3,50	51,31
6.	Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY	26,50	22,84	0,00	49,34
7.	Inspektorat DIY	23,20	26,12	0,00	49,32
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	18,60	26,69	0,00	45,29
9.	Badan Penghubung Daerah DIY	0,00	11,38	31,50	42,88
10.	Paniradya Kaistimewan DIY	0,00	5,69	35,00	40,69
11.	Dinas Kelautan Dan Perikanan DIY	15,70	21,31	3,50	40,51
12.	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga DIY	18,90	21,53	0,00	40,43
OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ	UJI WEBSITE	UJI AKSES	TOTAL NILAI
		30%	35%	35%	
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman	11,40	12,73	35,00	59,13

2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	16,00	24,72	17,50	58,22
3.	RSUD WATES	22,80	8,66	26,60	58,06
4.	Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta	15,10	7,22	33,25	55,57
5.	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta	17,30	2,19	35,00	54,49
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman	23,10	31,28	0,00	54,38
7.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman	10,20	8,88	35,00	54,08
8.	Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta	6,50	11,03	31,50	49,03
9.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman	16,20	27,35	0,00	43,55
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta	11,20	13,87	17,50	42,57
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	15,80	11,95	14,00	41,75
12.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta	3,30	2,19	35,00	40,49
OPD KAPANEWON/KEMANTREN SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Kapanewon Pandak	0,00	24,72	35,00	59,72
2.	Kapanewon Temon	10,80	11,64	35,00	57,44
3.	Kemantren Mergangsan	6,60	15,23	35,00	56,83
4.	Kemantren Umbulharjo	2,80	21,61	31,50	55,91

5.	Kapanewon Kokap	12,10	8,31	35,00	55,41
6.	Kapanewon Banguntapan	0,00	20,13	35,00	55,13
7.	Kemantren Ngampilan	5,20	18,38	31,50	55,07
8.	Kapanewon Bantul	20,90	30,19	0,00	51,09
9.	Kemantren Pakualaman	12,30	23,71	14,00	50,01
10.	Kapanewon Berbah	0,00	18,25	31,50	49,75
11.	Kapanewon Paliyan	17,50	0,00	31,50	49,00
12.	Kapanewon Kasihan	17,20	0,00	31,50	48,70
13.	Kapanewon Kalasan	2,60	26,25	16,10	44,95
14.	Kapanewon Sanden	17,20	26,51	0,00	43,71
15.	Kapanewon Girimulyo	12,90	8,31	21,00	42,21
16.	Kapanewon Sewon	0,00	9,01	31,50	40,51

LEMBAGA LEGISLATIF SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	DPRD Kabupaten Gunungkidul	23,30	0,00	35,00	58,30
2.	DPRD Kabupaten Bantul	0,00	7,00	35,00	42,00

LEMBAGA YUDIKATIF SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Pengadilan Negeri Sleman	24,40	23,80	0,00	48,20

LEMBAGA NON STRUKTURAL SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Bawaslu Gunungkidul	27,60	29,53	0,00	57,13
2.	KPU Kabupaten Bantul	21,80	26,56	0,00	48,36
INSTANSI VERTIKAL SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo	2,20	15,62	35,00	52,82
2.	Kementerian Agama Kota Yogyakarta	22,00	26,91	0,00	48,91
3.	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY	25,80	21,96	0,00	47,76
4.	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DIY	21,00	22,53	0,00	43,53
5.	Polres Bantul	0,00	8,49	35,00	43,49
6.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	19,00	21,83	0,00	40,83
BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	PT.Badan PublikR Bank Bantul (Perseroda)	25,90	29,05	3,50	58,45
2.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projo Tamansari Kabupaten Bantul	17,20	5,25	35,00	57,45
3.	Perumda Aneka Dharma	5,20	4,20	31,50	40,90

5. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “TIDAK INFORMATIF”

OPD PEMERINTAH DAERAH DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Biro Organisasi Setda DIY	18,40	19,43	0,00	37,82
2.	Dinas Pariwisata DIY	14,90	18,20	3,50	36,60
3.	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	8,70	21,44	0,00	30,14
4.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY	11,20	18,77	0,00	29,97
5.	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	10,50	17,90	0,00	28,40
6.	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	4,90	22,27	0,00	27,17
7.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset DIY	10,50	12,43	0,00	22,93
8.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik DIY	0,00	21,96	0,00	21,96
9.	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	19,10	0,00	0,00	19,10
10.	Biro Hukum Setda DIY	6,30	8,23	3,50	18,03
11.	Dinas Kebudayaan DIY	0,00	17,11	0,00	17,11
12.	Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda DIY	1,40	7,26	0,00	8,66
13.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY	0,00	6,56	0,00	6,56
14.	Badan Pendidikan Dan Pelatihan DIY	0,00	3,06	0,00	3,06

OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	4,60	14,88	17,50	36,97
2.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sleman	11,70	24,81	0,00	36,51
3.	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	12,80	2,63	21,00	36,43
4.	Bagian Perekonomian Dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta	0,00	1,31	35,00	36,31
5.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta	19,30	15,84	0,00	35,14
6.	Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta	15,30	7,88	9,10	32,28
7.	Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	9,90	22,31	0,00	32,21
8.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	19,40	12,51	0,00	31,91
9.	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kota Yogyakarta	18,40	12,65	0,00	31,04
10.	Bagian Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	6,20	23,85	0,00	30,05
11.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	8,10	21,00	0,00	29,10
12.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	7,40	20,04	0,00	27,44
13.	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta	7,20	5,03	14,00	26,23

14.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	0,00	26,12	0,00	26,12
15.	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	8,00	17,20	0,00	25,20
16.	Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	9,70	15,49	0,00	25,19
17.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	4,80	4,81	14,00	23,61
18.	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	0,00	5,69	17,50	23,19
19.	Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman	7,00	15,14	0,00	22,14
20.	Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Yogyakarta	6,80	15,27	0,00	22,07
21.	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta	4,70	17,24	0,00	21,94
22.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman	0,00	17,24	0,00	17,24
23.	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	9,50	5,25	0,00	14,75
24.	Dinas Perindustrian, Koperasi, Ukm Kota Yogyakarta	6,90	6,74	0,00	13,64
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta	0,00	11,29	0,00	11,29
26.	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	0,00	9,80	0,00	9,80
27.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	0,00	7,96	0,00	7,96
28.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Yogyakarta	1,00	4,81	0,00	5,81
29.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	5,80	0,00	0,00	5,80
30.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman	0,80	4,60	0,00	5,40

31.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	0,00	0,00	0,00	0,00
OPD KAPANEWON/KEMANTREN SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Kapanewon Jetis	10,40	24,72	0,00	35,12
2.	Kemantren Gedongtengen	12,30	22,40	0,00	34,70
3.	Kemantren Tegalrejo	0,00	6,13	26,25	32,38
4.	Kapanewon Pleret	8,70	17,41	3,50	29,61
5.	Kapanewon Dlingo	0,00	22,53	3,50	26,03
6.	Kapanewon Srandakan	4,80	15,31	0,00	20,11
7.	Kapanewon Pundong	0,00	11,20	3,50	14,70
8.	Kapanewon Pakem	6,10	0,00	0,00	6,10
9.	Kapanewon Panjatan	0,20	4,38	0,00	4,58
LEMBAGA LEGISLATIF SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	DPRD Kota Yogyakarta	5,20	21,31	0,00	26,51

LEMBAGA YUDIKATIF SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Pengadilan Negeri Bantul	0,00	25,68	0,00	25,68
LEMBAGA NON STRUKTURAL SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	KPU Kabupaten Sleman	15,20	15,23	0,00	30,43
INSTANSI VERTIKAL SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Polda DIY	8,00	13,04	0,00	21,04
2.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo	5,00	15,40	0,00	20,40
3.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul	0,00	18,25	0,00	18,25
4.	Polres Kulonprogo	0,60	11,99	0,00	12,59
5.	Polresta Yogyakarta	0,00	2,19	3,50	5,69
6.	Polres Gunungkidul	0,00	5,34	0,00	5,34
7.	Kejaksaan Negeri Kulon Progo	0,00	3,06	0,00	3,06
8.	Polres Sleman	0,00	2,71	0,00	2,71
9.	Korem 072/Pmk	0,00	0,88	0,00	0,88

10.	Kodim 0729 Bantul	0,20	0,44	0,00	0,64
11.	Kodim 0734/Kota Yogyakarta	0,00	0,44	0,00	0,44
12.	Kodim 0731/Kulon Progo	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kodim 0732/Sleman	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kodim 0730 Gunungkidul	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTAI POLITIK SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	DPW Partai Keadilan Sejahtera DIY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPD PDI Perjuangan DIY	0,00	1,31	0,00	1,31
BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY					
NO	NAMA BADAN PUBLIK	SAQ 30%	UJI WEBSITE 35%	UJI AKSES 35%	TOTAL NILAI
1.	Perumda Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo	0,00	4,90	35,00	39,90
2.	Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta	2,80	5,60	26,25	34,65
3.	PDAM Sleman	0,00	7,35	3,50	10,85
4.	PT. Anindya Mitra Internasional	5,50	0,35	3,50	9,35
5.	PT. Selo Adikarto	0,00	2,45	0,00	2,45
6.	Perumda Aneka Usaha Kulon Progo	0,00	0,00	0,00	0,00

6. BADAN PUBLIK KUALIFIKASI “TIDAK DINILAI”

LEMBAGA LEGISLATIF SE-DIY		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	KETERANGAN
1.	DPRD Provinsi DIY	Tidak Registrasi
LEMBAGA YUDIKATIF SE-DIY		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	KETERANGAN
1.	Pengadilan Agama Bantul	Tidak Registrasi
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta	Tidak Registrasi
3.	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	Tidak Registrasi
INSTANSI VERTIKAL SE-DIY		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	KETERANGAN
1.	Kejaksaan Tinggi DIY	Tidak Registrasi
2.	Kejaksaan Negeri Sleman	Tidak Registrasi
3.	Kejaksaan Negeri Yogyakarta	Tidak Registrasi
4.	Kejaksaan Negeri Bantul	Tidak Registrasi
5.	Kejaksaan Negeri Gunung Kidul	Tidak Registrasi
6.	Kanwil Kementerian Agama (KEMENAG) DIY	Tidak Registrasi
7.	Kanwil Badan PublikN DIY	Tidak Registrasi
8.	Kantor Pertanahan (KANTAH) Kabupaten Sleman	Tidak Registrasi
9.	Kantor Pertanahan (KANTAH) Kota Yogyakarta	Tidak Registrasi
10.	Kantor Pertanahan (KANTAH) Kabupaten Bantul	Tidak Registrasi
11.	Kantor Pertanahan (KANTAH) Kabupaten Gunungkidul	Tidak Registrasi

12.	Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional Yogyakarta	Tidak Registrasi
LEMBAGA NON STRUKTURAL SE-DIY		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	KETERANGAN
1.	Lembaga Ombudsman DIY	Tidak Registrasi
2.	Ombudsman RI Perwakilan DIY	Tidak Registrasi
PARTAI POLITIK SE-DIY		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	KETERANGAN
1.	DPD GOLKAR DIY	Tidak Registrasi
2.	DPD DEMOKRAT DIY	Tidak Registrasi
3.	DPD PKB DIY	Tidak Registrasi
4.	DPD PAN DIY	Tidak Registrasi
5.	DPW NASDEM DIY	Tidak Registrasi
6.	DPD PSI DIY	Tidak Registrasi
7.	DPD PPP DIY	Tidak Registrasi
BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY		
NO	NAMA BADAN PUBLIK	KETERANGAN
1.	PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul	Tidak Registrasi
2.	Bank Badan PublikD DIY	Tidak Registrasi
3.	PD Taru Martani DIY	Tidak Registrasi

c. Kejuaraan

Setelah didapat hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tim Monitoring dan Evaluasi kemudian visitasi terhadap 3 Badan Publik yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap cluster dengan catatan yang telah disyaratkan badan publik tersebut minimal mempunyai nilai 90 (sembilan puluh) atau memenuhi klasifikasi “Informatif”.

Penentuan juara dalam tiap kategori dilakukan dengan cara visitasi secara offline dengan melihat secara langsung kondisi lapangan badan publik yang masuk tahapan kejuaraan. Penentuan juara dilakukan terhadap seluruh kategori kecuali partai politik karena tidak ada yang masuk kualifikasi informatif. Terdapat juara 1, 2, dan 3 dalam tiap kategori kecuali kategori lembaga legislatif yang hanya terdapat juara 1, kategori lembaga yudikatif yang hanya terdapat juara 1 dan 2, kategori badan usaha milik daerah yang hanya terdapat juara 1, Hal itu sesuai dengan jumlah badan publik yang memenuhi kualifikasi informatif.

Hasil Kejuaraan Keterbukaan Informasi juga tertuang di dalam Surat Keputusan nomor 02/KEP/KIDDIY/X/2021 tentang “Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik pada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021”.

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK
TAHUN 2021
BERDASARKAN KEJUARAAN BADAN PUBLIK**

1. KATEGORI : PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	Pemerintah Kabupaten Sleman	90,00
2.	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	89,00
3.	Pemerintah Kabupaten Bantul	88,00

2. KATEGORI : OPD PEMERINTAH DAERAH DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	Badan Kepegawaian Daerah DIY	92,00
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk DIY	91,00
3.	Dinas Sosial DIY	85,00

3. KATEGORI : OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo	97,00
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo	95,00
3.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo	82,00

4. KATEGORI : OPD KAPANEWON/KEMANTREN SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	Kapanewon Depok	94,00
2.	Kemantren Mantrijeron	85,00
3.	Kapanewon Ngaglik	77,00

5. KATEGORI : LEMBAGA LEGISLATIF SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	DPRD Kabupaten Kulon Progo	Tidak divisitasi karena dari kategori Legislatif hanya 1 Badan Publik yang masuk Kualifikasi "Informatif"

6. KATEGORI : LEMBAGA YUDIKATIF DI DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	Pengadilan Agama Yogyakarta	92,00
2.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	86,00

7. KATEGORI : LEMBAGA NON STRUKTURAL SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY	98,00
2.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	94,00
3.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	89,00

8. KATEGORI : INSTANSI VERTIKAL DI DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan D.I. Yogyakarta	98,00
2.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	89,00
3.	Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik	87,00

9. KATEGORI : BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-DIY

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PT. Badan PublikR Bank Sleman (PERSERODA)	Tidak divisitasi karena dari kategori BUMD hanya 1 Badan Publik yang masuk Kualifikasi "Informatif"

d. Apresiasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

Selain pemeringkatan dan kejuaraan, untuk mendorong komitmen Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Infomasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan Anugerah Apresiasi kepada sejumlah tokoh dan Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kriterianya masing-masing dalam hal Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan tujuan adanya peningkatan keterbukaan Informasi Publik di Kota/Kabupaten se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemberian Penghargaan Apresiasi ini diberikan setiap tahun. Untuk tahun ini penganugerahan keterbukaan informasi diberikan apresiasi kepada:

1. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Tokoh Keterbukaan Informasi Publik, mengingat sebagai Kepala

Daerah yang berkomitmen dan konsistensi dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan pembentukan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2011. Dan adanya PERDA Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;

2. Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah berkomitmen mendorong daerahnya masing-masing untuk meningkatkan Pelayanan Informasi Publik;

3. Bupati Kulon Progo yang berkomitmen untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik di kalurahan dibuktikan dengan masuknya kalurahan karangsari Kapanewon Pengasih sebagai peringkat 8 Nasional apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik desa yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI serta Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;

4. POLDA DIY sebagai badan publik yang secara rutin menyampaikan laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. PPID Utama Kabupaten Kulon Progo yang berkomitmen untuk mendorong PPID Pelaksana di Kabupaten Kulon Progo menjadi Informatif;

6. Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih sebagai perwakilan kalurahan tingkat kabupaten kulon progo yang selanjutnya diseleksi masuk tahapan nasional apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik desa;

7. Kalurahan murtigading Kapanewon Sanden sebagai perwakilan kalurahan tingkat kabupaten bantul yang selanjutnya diseleksi masuk tahapan nasional apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik desa;

8. Kalurahan ambarketawang Kapanewon Gamping sebagai perwakilan kalurahan tingkat kabupaten sleman yang selanjutnya diseleksi masuk tahapan nasional apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik desa;
9. Kalurahan pucung sebagai perwakilan kalurahan tingkat kabupaten gunungkidul yang selanjutnya diseleksi masuk tahapan nasional apresiasi implementasi keterbukaan informasi publik desa;
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai Badan Publik Dengan Capaian Nilai Tertinggi Di Tingkat Kabupaten Kulon Progo;
11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai Badan Publik Dengan Capaian Nilai Tertinggi Di Tingkat Kabupaten Bantul;
12. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gunungkidul sebagai Badan Publik Dengan Capaian Nilai Tertinggi Di Tingkat Kabupaten Gunungkidul;
13. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman sebagai Badan Publik Dengan Capaian Nilai Tertinggi Di Tingkat Kabupaten Sleman;
14. Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai Badan Publik Dengan Capaian Nilai Tertinggi Di Tingkat Kota Yogyakarta;

5. Kondisi Umum dan Pembelajaran

Dari serangkaian proses monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Tim Monev Keterbukaan Informasi mendapatkan beberapa catatan, antara lain:

a. Kondisi Umum

Secara Umum Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 berjalan dengan baik dengan hasil

yang sangat baik. Hal ini bisa di lihat dari beberapa parameter antara lain:

1. Tingkat Partisipasi Badan Publik Dalam Mengikuti Monitoring dan Evaluasi meningkat 3.13 %.
2. Badan Publik yang memperoleh kualifikasi “Informatif” mengalami peningkatan 15,15 %.
3. Badan Publik yang dilakukan Visitasi menyediakan dokumen yang sesuai.
4. PPID Utama Kota/Kabupaten seluruh DIY mengalami peningkatan kualifikasi dan peningkatan nilai hal ini patut mendapatkan apresiasi dengan tantangan kedepan untuk mempertahankan dengan meningkatkan penilaian.

b. Catatan Khusus

Dari berbagai hal yang ditemui selama monitoring dan evaluasi, terdapat catatan khusus yang perlu mendapat perhatian dari Badan Publik antara lain:

a. Catatan Di Internal (Team Monev)

- a. Kurangnya sosialisasi koordinasi lagi dengan badan public khususnya dengan PPID Utama
- b. Kurang komunikasi dan pendampingan pada BUMD, VERTIKAL, LEGISLATIF, YUDIKATIF, PARPOL
- c. Memastikan instrument indikator dipahami semua tim.
- d. Koordinasi tim masih banyak lewat daring sehingga kurang efektif.
- e. Minimnya pembiayaan.

b. Catatan Di External (Peserta Monev)

- a. Komitmen Badan Publik kurang sehingga tidak melakukan registrasi pada waktu yang di tetapkan pada kurun waktu yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 2 - 7 Juni 2021.

- b. Masih terdapat beberapa Badan Publik yang tidak melakukan pengisian SAQ pada kurun waktu yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 11 Juni – 6 Juli 2021.
- c. Badan Publik tidak memperhatikan tata cara dan tata kala yang sudah disosialisasikan. Serta kurangnya koordinasi internal di Badan Publik sehingga materi yang disampaikan pada saat sosialisasi monev tidak tersampaikan secara maksimal ke PLID ataupun petugas yang ditunjuk untuk mengisi SAQ sehingga pengisian SAQ belum maksimal.
- d. Masih belum mengetahui pengisian SAQ dengan aplikasi beranggapan masih metode yang sama dengan sistem manual/unduh.
- e. Adanya Organisasi Perangkat Daerah masih baru terbentuk.
- f. Masih terdapat beberapa Badan Publik yang menjawab “Ya” tetapi tidak mencantumkan link dan/atau data pendukung lainnya.
- g. Masih terdapat data pendukung yang disampaikan oleh Badan Publik yang tidak relevan dengan pertanyaan.
- h. Masih terdapat dokumen data pendukung yang di-compress dalam bentuk rar, zip, dll sehingga tidak dapat dibuka.
- i. Masih terdapat link data pendukung yang telah diunggah di cloud storage (Gdrive, Mega, Onedrive, Dropbox, dll), namun masih di-lock / dikunci sehingga tidak dapat dibuka / diakses.
- j. Masih terdapat beberapa Badan Publik yang mencantumkan link data pendukung lebih dari satu link website tanpa diberi jeda spasi, koma, ataupun titik koma sehingga error ketika di-klik / dibuka.

- k. Masih terdapat link data pendukung yang belum diarahkan ke url yang langsung menjawab pertanyaan, sehingga perlu mencari dokumen dimaksud dengan beberapa kali masuk ke sub menu terlebih dahulu.
- l. Masih terdapat data pendukung link website yang diarahkan ke sub menu yang dokumennya telah dihapus atau dipindah ke sub menu lainnya sehingga dokumen tidak ditemukan pada saat di-klik.

c. Nilai Pembelajaran

Proses Monitoring dan Evaluasi tahun 2021 yang dilakukan Team Monev mendapatkan pelajaran yang bisa di pakai untuk proses evaluasi di Internal Badan Publik dan kerja-kerja Team Monev kedepan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Adapun pembelajaran itu antara lain;

1. Dari Internal Team

- a. Perlunya persamaan persepsi dan cara pandang terhadap aturan yang dipakai sebagai acuan pembuatan Indikator.
- b. Perlu ketegasan dari team terkait agenda yang sudah ditetapkan.
- c. Perlunya kesadaran dari awal akan tugas dan fungsi tim monev.
- d. Meningkatkan pola komunikasi dengan badan publik.
- e. Memastikan indikator mudah dipahami dan tidak multitafsir.
- f. Memastikan koordinator klaster menjalankan perannya dengan baik.

2. Evaluasi kepada Badan Publik;

- a. Pentingnya komitmen pimpinan OPD dalam keterbukaan informasi publik.

- b. Perlunya petugas yang merupakan bagian dari PPID untuk mengecek email dan media sosial lainnya setiap hari.
- c. Perlunya alokasi anggaran untuk ketebukaan informasi publik.
- d. PPID harus selalu melakukan *update* berkaitan dengan informasi yang di upload di media sosial lembaga.
- e. Perlunya pemahaman kembali akan peran dan fungsi PPID.
- f. Perlunya peningkatan kapasitas PPID dan PLID.

6. Penutup

Selamat kepada para penerima penganugerahan Semoga tidak cepat berpuas diri, sehingga dapat terus semangat dalam meningkatkan budaya keterbukaan informasi publik di lembaga masing-masing. Bagi badan publik yang baru mencapai kualifikasi tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, dan menuju informatif kami berharap tahun depan dapat meningkatkan peringkatnya dan tidak berkecil hati, harus lebih termotivasi lagi dengan segera mengevaluasi, mengoreksi, dan memperbaiki praktek keterbukaan informasi publik yang berjalan Selama ini di lembaga masing-masing. Kami juga berharap agar seluruh badan publik di DIY terus melakukan upaya dan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik sehingga Pemda DIY dapat mempertahankan peringkat informatif yang telah dicapai tahun ini, bahkan dapat meningkatkan lagi nilainya.

Kami haturkan terima kasih juga lembaga perguruan tinggi Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP), IDEA Yogyakarta, Combine Resource Institution (CRI), Para Pimpinan Badan Publik di DIY, serta semua pihak yang telah mendukung monitoring dan evaluasi ini. Kami berharap monitoring

dan evaluasi ini menjadi bagian dari pembelajaran kita semua untuk menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 01 Desember 2021

Ketua

Komisi Informasi Daerah DIY



(H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum)